




DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
TATA RUANG KOTA METRO



RENJA 2026

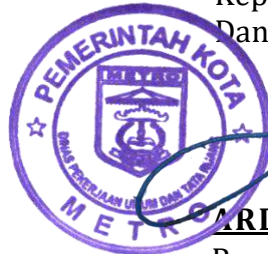


 Jl. ZA. Pagar Alam No. 46 Kota Metro

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 sebagai implementasi tahapan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029. Rencana Kerja disusun dalam rangka memberikan arah/pedoman rencana tindak lanjut Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dan Renja ini juga merupakan kegiatan solusi dari persoalan, masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Akhir kata kami sangat berharap semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dijadikan acuan dan panduan bagi seluruh aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruag Kota Metro sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan.

Kota Metro, 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Kota Metro



ARDAH, S.E, M.A.P

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19690805 198803 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. P E N D A H U L U A N	
1.1 Latar Belakang.....	I.1
1.2 Landasan Hukum	I.6
1.3 Maksud dan Tujuan	I.11
1.4 Sistematika Penulisan	I.11
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan CapaianRenstraPerangkat Daerah	II.1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II.18
2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II.22
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	II.24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II.43
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III.1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	III.5
3.3 Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	III.8
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.....	IV.1
BAB V. PENUTUP	V.1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja OPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja OPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja OPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja OPD dengan mengumpulkan data dan informasi. Menganalisa gambaran pelayanan OPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPd. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja OPD, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra OPD dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing OPD;
- c. Penyusunan Renja OPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja OPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif OPD;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja OPD dengan dokumen perencanaan lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena dokumen Renja OPD merupakan penjabaran dari Renstra memiliki hubungan keselarasan dengan dokumen daerah lainnya baik RPJMD, maupun RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

Berdasarkan Peraturan Walikota Metro No.30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi organisasi meliputi 1 sekretariat dan 4 bidang serta 3 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas yaitu:

1. Sekretariat;
2. Bidang Bina Marga;
3. Bidang Cipta Karya;
4. Bidang Sumber Daya Air;
5. Bidang Tata Ruang;
6. UPTD Pengairan
7. UPTD Air Minum
8. UPTD Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT)

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merupakan salahsatu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Renja dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah hingga tahun yang telah dilalui.

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023.

Dalam penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro memuat beberapa hal antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan Renstra.
2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dokumen Renstra pada tahun berjalan.

3. Program dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja keluaran (output), yang bersifat realistis dan terukur, dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Mengingat kedudukan strategis tersebut maka untuk menghasilkan dokumen Renja yang berkualitas terdapat tahapan proses dan cakupan komprehensif yang harus terpenuhi. Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

1. Persiapan Penyusunan

Persiapan penyusunan renja meliputi :

- (a) Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- (b) Orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah ;
- (c) Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah ;dan
- (d) Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru

yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

3. Penyusunan Rancangan

Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah untuk kemudian dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pelaksanaan dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan dilakukan pembahasan dengan pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir

Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah. Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.

Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;

- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. penutup.
6. Penetapan
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2026(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33) ;
 17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2026;
25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010

- tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2026(Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
 27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro tahun 2022-2041;
 28. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 14);
 29. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9)
 30. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 31. Peraturan Walikota Metro Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;

32. Peraturan Walikota Metro Nomor 07 Tahun 2025 Tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2026 sebagai pedoman dalam menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan serta mengevaluasi hasil kinerja setiap tahun berdasarkan capaian target indikator program yang telah ditetapkan agar lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2026 disusun dengan tujuan :

- a. sebagai penjabaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029;
- b. sebagai pelaksana teknis kegiatan prioritas pembangunan daerah;
- c. sebagai dasar penetapan program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan target indikator kinerja dan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2026 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 latar Belakang;
- 1.2 Landasan Hukum;
- 1.3 Maksud dan Tujuan;
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas;
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah oleh karena itu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro harus dievaluasi.

Evaluasi pada dasarnya merupakan kajian yang merupakan kegiatan mencari faktor-faktor penyebab timbulnya permasalahan, bukan hanya sekedar gejala yang tampak dalam permukaan. Karena itu evaluasi merupakan kegiatan diagnostik, menjelaskan interpretasi hasil analisis data dan kesimpulan. Dalam konteks manajemen organisasi evaluasi bertujuan untuk mengetahui pencapaian kinerja, kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh organisasi perangkat daerah. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula

cara membandingkan antara output dan input kegiatan, baik untuk rencana maupun realisasi dalam pencapaian kinerja di tahun sebelumnya. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro selama satu tahun 2026.

Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan. Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam tabel 2.1 di bawah :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /Kegiatan					Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja hasil program dan keluaran Kegiatan s.d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan		
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2					3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)	
1	3	1			Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	100	100	100	100	100%	100	100%	
1	3	1	2.01		Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9	8	8	8	100%	9	8	90%
1	3	1	2.01	1	Sub Kegiatan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	6	6	6	100%	4	6	144%
1	3	1	2.01	3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2	2	2	2	100%	2	2	100%

1	3	1	2.01	6	Sub Kegiatan	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	2	2	2	100%	3	2	35%
	3	1	2.02		Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	3	1	2.02	1	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73	74	74	74	100%	74	74	101%
1	3	1	2.02	2	Sub Kegiatan	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100%	12	12	100%
1	3	1	2.02	5	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8	4	4	4	100%	12	5	61%
1	3	1	2.02	7	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9	10	10	10	100%	16	11	119%
					Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	12	0	0	0	0%	0	0	0%
					Sub	Koordinasi dan	Jumlah Dokumen Hasil	73	0	0	0	0%	0	0	0%

					Kegiatan	Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian										
1	3	1	2.06		Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakandenganbaik	100	100	100	100	100%	100	100	100	100%	
1	3	1	2.06	1	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10	20	20	20	100%	10	19	189%		
1	3	1	2.06	2	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14	10	10	10	100%	14	10	75%		
1	3	1	2.06	4	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	120	175	175	175	100%	120	169	141%		
1	3	1	2.06	5	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	10	10	10	100%	60	16	26%		
1	3	1	2.06	6	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	52	90	90	90	100%	50	86	165%		
1	3	1	2.06	9	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	16	16	16	100%	10	15	153%		
1	3	1	2.06	10	Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis	1	2	2	2	100%	1	2	189%		
1	3	1	2.07		Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	1	4	4	4	100%	28	7	667%		
1	3	1	2.07	5	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	4	4	4	100%	28	7	667%		
1	3	1	2.08		Kegiatan	Penyediaan Jasa	Persentase Jasa	100	100	100	100	100%	100	100	100%		

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
1	3	1	2.08	1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	150	300	300	300	100%	150	283	189%	
1	3	1	2.08	2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	14	14	14	100%	12	14	115%	
1	3	1	2.08	3	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	41	82	82	82	100%	41	77	189%	
1	3	1	2.09		Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihar dengan baik	100	100	100	100	100%	100	100	100%	
1	3	1	2.09	1	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1	0	0	0	0%	1	0	11%	
1	3	1	2.09	2	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22	25	25	25	100%	22	25	112%	
1	3	1	2.09	3	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4	4	4	4	100%	4	4	100%	

						Perizinan Alat Besar											
1	3	1	2.09	6	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	30	30	30	100%	40	31	78%		
1	3	1	2.09	11	Sub Kegiatan	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	2	2	2	100%	3	2	53%		
1	3	2			Program	Penyelenggaraan Jalan	Persentase jalan kotadalam kondisimantap	92,27	88,03	91,85	84,97	93%	92,06	83,74	91%		
1	3	2	2.01		Kegiatan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kotadalam kondisimantap	92,27	88,03	91,85	84,97	93%	92,06	83,74	91%		
1	3	2	2.01	4	Sub Kegiatan	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	0	0	0	0	0%	4	0	1%		
1	3	2	2.01	9	Sub Kegiatan	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan	0	0	0	0	0%	15	1,67	0%		
1	3	2	2.01	46	Sub Kegiatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	0	1363	1363	1363	100%	1363	1212,22	194%		
1	3	2	2.01	53	Sub Kegiatan	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	2,15	2,3	9,5	8,7	91%	5	7,82	364%		
1	3	2	2.01	61	Sub Kegiatan	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	3,54	18,7	3,4	2,6	78%	6	10,16	287%		
	3	2	2.02		Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0	0,9	7,5	6,8	90%	2,8	3,72	34%		
1	3	2	2.02	2	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	3,44	2,6	3,2	2,5	79%	4,26	2,72	79%		
					Sub Kegiatan	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvei Kondisinya	387307									

					Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	10,91									
1	3	2	2.02	8	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	1	4,9	2,5	1,5	60%	1	2,96	296%		
1	3	2	2.02	21	Sub Kegiatan	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	0	6	1	0	0%	19	4,78	0%		
1	3	3			Program	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	78	65	75	70	93%	75	80	103%		
1	3	3	2.01		Kegiatan	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/ Kota dan Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat	47	18900	18900	16318	86%	17500	17597	37%		
1	3	3	2.01	7	Sub Kegiatan	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang Saluran Drainase yang Dibangun	0	50000	0	0	0%	0	22222	0%		
1	3	3	2.01	15	Sub Kegiatan	Peningkatan Saluran drainase perkotaan	Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4500	54000	21250	19125	90%	12500	33889	75%		
1	3	4			Sub Kegiatan	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	0	67	67	59,85	89%	0	56	0%		
1	3	4	2.01		Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan dan Dipelihara	200	0	0	0	0%	3000	333	17%		
1	3	2		6	Program	Pengelolaan Sumber Daya Air	Rasio luas Tidak terjadigenangan > 2 kali setahun	20	40	30	35	117%	25	25	100%		
1	3	2	2.01		Kegiatan	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman	Jumlah bangunan SDA dan Bangunan Pengaman	1,62	1,00	1,00	1,00	1,06	1,00	1,00	0,50		

						Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								
1	3	2	2.01	3	Sub Kegiatan	PenyusunanRencana teknis dan DokumenLingkungan Hidup untukkonstruksiPengendalianBanjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanpantai	JumlahRencana Teknis DokumenLingkungan Hidup untukkonstruksiPengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengamanpantai yang disusun	0	0	2	2	100%	0	1	0%
1	3	5	2.01	4	Sub Kegiatan	Penyusunan Pola dan RencanaPengelolaan SDA WS KewenanganKabupaten/ Kota	JumlahPenyusunan Pola dan RencanaPengelolaan SDA WS KewenanganKabupaten/Kota	0	0	0	0	0%	2	0	0%
1	3	5	2.01	4	Sub Kegiatan	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	JumlahEmbung dan Penampung Air Lainnya Yang Dibangun	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	2	2.01	9	Sub Kegiatan	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	1,2	4,00	4,00	4,00	1,00	0,00	4,00	0,03
1	3	2	2.01	26	Sub Kegiatan	Rehabilitasi Pintu Air/BendungPengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/BendungPengendaliBanjir yang Direhabilitasi	1	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	2	2.01	46	Sub Kegiatan	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi /Direstorasi	0,4	0	0	0	0%	3	0	1%
1	3	2	2.01	53	Sub Kegiatan	Operasi dan PemeliharaanTanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0,02							
1	3	2	2.02	2	Sub Kegiatan	Pembangunan JaringanIrigasiPermukaan	Panjang JaringanIrigasiPermukaan yang Dibangun	0,05	4	4	4	100%	1	4	3%
1	3	2	2.02	8	Program	PeningkatanJaringanIrigasiPermukaan	Panjang JaringanIrigasiPermukaan yang Ditingkatkan	0,06	2	2	2	100%	1	2	2%
1	3	2	2.02	21	Kegiatan	Operasi dan	Panjang	0,03	2	2	2	100%	0	2	1%

						Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara												
1	3	3			Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2951	2591	2651	2695	102%	2751	2679	94%				
1	3	3	2.01		Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota	2951	2591	2651	2695	102%	2751	2679	94%				
1	3	8	2.01	12	Sub Kegiatan	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Tahun	0	168	300	300	100%	0	208	0%				
1	3	3	2.01	7	Sub Kegiatan	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	0	0	0	0	0%	2751	306	11%				
1	3	3	2.01	15	Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang mendapatkan operasi dan pemeliharaan	2457	1	1	1	100%	1	1	100%				
1	3	4			Program	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan	28	26	26	23	88%	26	25	88%				
1	3	4	2.01		Kegiatan	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	1	1	1	7	700%	7	4	5%				
1	3	4	2.01	6	Sub	Penyediaan Sarana	Jumlah Sarana	0	1	1	1	100%	7	2	2%				

					Kegiatan	Persampahan	Persampahan yang Disediakan								
1	3	4	2.01	17	Sub Kegiatan	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS		1	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	10	2.01	1	Program	Pengembangan Permukiman	Persentase Area Kawasan Kumuh	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	10	2.01	3	Kegiatan	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Area Kawasan Kumuh	0	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	10	2.01	4	Sub Kegiatan	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Area Kawasan Kumuh	0	70	0	0	0%	0	31	23%
1	3	5			Program	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	450	150	350	375	107%	400	308	68%
1	3	5	2.01		Kegiatan	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak	450	150	350	375	107%	400	308	68%
1	3	5	2.01	22	Sub Kegiatan	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah penerima manfaat penyediaan sanitasi layak	1	150	375	375	100%	0	233	0%
1	3	5	2.01	33	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani	0	0	0	0	0%	175	19	0%
1	3	5	2.01	38	Sub Kegiatan	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air	Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang	0	0	0	0	0%	1	0	11%

						Limbah Domestik	Diperasikan dan Dipelihara										
1	3	5	2.01	39	Sub Kegiatan	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Tangki Septik yang sesuai standar	192	0	0	0	0%	0	0	0	0%	
1	3	11			Program	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	60	0	30	10	33%	45	18	31%		
1	3	11	2.01		Kegiatan	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi	60	0	30	10	33%	45	18	31%		
1	3	11	2.01	4	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan	60	0	60	60	100%	90	37	0%		
1	3	11	2.01	16	Sub Kegiatan	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	0	0	0	0	0%	0	0	0%		
1	3	11	2.02		Kegiatan	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	10	0	0	0	0%	30	3	33%		
1	3	11	2.02	6	Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Jumlah Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	0	0	0	0	0%	20	2	0%		
1	3	11	2.02	10	Sub Kegiatan	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	0	0	0	0	0%	10	1	0%		
1	3	11	2.02	13	Sub Kegiatan	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	10	0	0	0	0%	0	0	0%		
1	3	8			Program	Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	14	8	12	10	83%	13	10,33	74%		

1	3	8	2.01		Kegiatan	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung	14	8	12	10	83%	13	11	78%
1	3	8	2.01	17	Sub Kegiatan	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	16	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	8	2.01	18	Sub Kegiatan	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	2	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	8	2.01	21	Sub Kegiatan	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13	0	0	0	0%	0	0	0%
1	3	8	2.01	23	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung	Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim Profesi Ahli (TPA),	70	8	12	11	92%	50	14	20%

						Strategis Lainnya	yang Ditata									
1	3	9	2.01	8	Sub Kegiatan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Persentase ketercukupan prasarana Gedung dalam kondisi baik	0	40	0	0	0%	0	18	0%	
1	3	12			Kegiatan	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Ketaatan terhadap RTRW	91	91	91	91	100%	91	91	100%	
1	3	12	2.01		Kegiatan	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	22	2	2	1	50%	1	1	7%	
1	3	12	2.01	13	Sub Kegiatan	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
1	3	12	2.01	2	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	220	1	4	4	100%	1	2	2%	
1	3	12	2.02	3	Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kab/kota	0	3	1	1	100%	6	2	3%	
1	3	12	2.02	2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	0	2	0	0	0%	1	1	1%	
1	3	12	2.02	8	Sub Kegiatan	Peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang	Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	0	1	1	1	100%	5	1	2%	

1	3	12	2.03		Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	0	2	1	1	100%	10	2	4%
1	3	12	2.03	1	Sub Kegiatan	Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang untuk investasi dan pembangunan daerah kab/kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	0	1	1	1	100%	5	1	2%
1	3	12	2.03	2	Sub Kegiatan	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	0	0	0	0	0%	5	1	2%
1	3	12	2.04		Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah kabupaten/Kota	6	1	1	1	100%	10	2	4%
1	3	12	2.04	2	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	0	0	0	0	0%	10	1	3%
1	3	12	2.04	3	Sub Kegiatan	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	1	0	0	0	0%	5	1	2%
1	3	12	2.04	4	Sub Kegiatan	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6	1	1	1	100%	5	1	2%

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil kinerja periode pelaksanaan Tahun 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang terdiri dari 11 program 20 kegiatan dan 56 sub kegiatan dengan rata – rata capaian hasil kinerja sebesar 89,7%.

Sedangkan capaian RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro tahun 2024 atau tahun ke 4 pelaksanaan RENSTRA 2021-2026, diperoleh data capaian kinerja untuk masing-masing indikator rata-rata mencapai 96,45% dari target RENSTRA yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.2. Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2024

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET DAN CAPAIAN		
				TARGET 2024	REALISASI 2024	%
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Pengelolaan infrastruktur jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	Peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	92,27%	70,18%	76%
	Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat		Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	78%	75%	96%
Meningkatkan Pengendalian Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	Peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan	Rasio luas wilayah tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	20%	24%	83%

Cakupan penduduk dengan akses air minum layak		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2851	2366	83%
Jumlah pengurangan sampah di perkotaan		Jumlah pengurangan sampah di perkotaan	28%	21%	75%
Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi		Persentase jumlah rumah tinggal bersanitasi	450	560	124%
Persentase area kawasan kumuh		Persentase area kawasan kumuh	0%	0%	100%
Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi		Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi	60%	0%	0%
Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	Peningkatan Pengelolaan Penataan Ruang	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	14%	15%	15%
Persentase ruang publik yang dirubah peruntukannya		Persentase ruang publik yang dirubah peruntukannya	0%	0%	100%
Ketataan terhadap RTRW		Ketataan terhadap RTRW	91%	100%	110%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro melaksanakan tugas dan fungsinya terdiri atas urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang digunakan sebagai analisis kinerja Pelayanan OPD. Keberhasilan suatu proses

perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan berdampak terhadap capaian yang telah ditetapkan di dalam RENSTRA SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Untuk tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 pada dasarnya bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro telah melaksanakan capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Adapun capaian kinerja indikator kinerja utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2022 s.d Tahun 2024 dan Proyeksi Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2026 terdapat pada tabel 2.3. sebagai berikut:

Tabel 2.3. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				RealisasiCapaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase proporsi jalan kota dalam kondisi mantap	Standar Nasional	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	92,06%	92,27 %	71,11	72,11	91%	76%	71,11	72,11	Pada Tahun 2024 Kota Metro mengeluarkan SK Jalan terbaru dimana panjang jalan Kota Metro 387,307 km sebanyak 626 ruas dari sebelumnya panjang jalan Kota Metro 567,81 sebanyak
2	Persentase Drainase dalam Kondisi baik / Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat		Meningkatnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	75%	78%	70,25%	70,50%	107%	96%	70,25%	70,50%	

												1363
3	Persentase luas wilayah tidak terjadi genangan >2 kali setahun		rasio luas tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	25%	20%	33,37%	42,94%	100%	83%	33,37%	42,94%	
4	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun	SPM	Jumlah Sambungan Rumah Aktif Pertahun	2751	2851	2951	149	102%	83%	2951	149	
5	Volume sampah di perkotaan yang mengalamigunaulang, daurulang, pengelolaan di tempatpenge lolaansampahsebelummasuk TPA		Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	26%	28%	13,50%	22,50%	63%	75%	13,50%	22,50%	Pada Indikator tersebut pengampu indikator kinerja ada pada Dinas LH, sedangkan Dinas PUTR hanya menyediakan sarana prasarana persampahan untuk menunjang indikator kinerja
6	Jumlahrumah tinggal dengana nakses sanitasi Aman dan Layak	SPM	Jumlah rumah tinggal dengan akses sanitasi Aman dan Layak	400	450	500	349	100%	111%	500	349	
7	Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi		Tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	45%	60%	75%	50%	100%	100%	75%	50%	
8	Presentase Area Kawasan Kumuh		Area kawasanbebas kumuh	0%	0%	0%	0%	100%	0%	0%	0%	
9	Rasio bangun anber- IMB per satuanbangunan		Bangunanber-IMB persatuanbangunan	13%	14%	15%	23,88%	100%	15%	15%	23,88%	
10	Persentase Ruang Publik yang Berubah Peruntukannya		Ruang publik yang tidak berubah peruntukannya	0%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	
11	PersentaseKe taatanTerhadap RTRW		KetaatanTerhadap RTRW	91%	91%	88%	89%	100%	110%	88%	89%	

Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dengan 2 indikator kinerja yaitu “Presentase jalan dalam kondisi mantap dengan target kinerja sebesar 92,27% dan realisasi sebesar 70,18% dengan capaian sebesar 76 % , dan “Presentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat dengan target kinerja sebesar 78% dan realisasi sebesar 85% dengan capaian sebesar 96% sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran strategis peningkatan pembangunan, rekonstruksi dan rehabilitasi jalan yaitu 86% atau tercapai dengan kriteria Baik . Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan dengan 6 indikator kinerja “Rasio luas wilayah Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun dengan target kinerja sebesar 20% dan realisasi sebesar 24 % dengan capaian sebesar 96%”, “Cakupan penduduk dengan akses air minum layak dengan target kinerja sebesar 2851 SR dan realisasi sebesar 2366 SR dengan capaian sebesar 83 %”, “Jumlah Pengurangan Sampah di Perkotaan dengan target kinerja sebesar 28% dan realisasi sebesar 21 % dengan capaian sebesar 75%”, “Persentase Jumlah rumah Tinggal bersanitasi (KK) dengan dengan target kinerja sebesar 450 KK dan realisasi 560 KK dengan capaian sebesar 124%”, “Persentase area Kawasan Kumuh dengan target kinerja sebesar 0% dan realisasi sebesar 0 % dengan capaian sebesar 100%”, , “Persentase jumlah tenaga konstruksi yang tersertifikasi dengan target kinerja sebesar 60% dan realisasi sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%”, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan yaitu 77.50% atau tercapai dengan kriteria Baik.

Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan pengelolaan peningkatan ruang dengan 3 indikator kinerja “Rasio

bangunan ber-IMB persatuan. bangunan (%)” dengan target kinerja sebesar 14% dan realisasi sebesar 15 % dengan capaian sebesar 107%”, “Persentase ruang publik yang berubah peruntukkannya (%) ” dengan target kinerja sebesar 0% dan realisasi sebesar 0% dengan capaian sebesar 100%”, dan “Ketaatan terhadap RTRW (%)” dengan target kinerja sebesar 91% dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 110%”, sehingga rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan pengelolaan kualitas lingkungan perkotaan yaitu 112% atau tercapai dengan kriteria Baik.

Berdasarkan pengukuran indikator sasaran peningkatan kualitas implementasi reformasi biokrasi dengan 1 indikator kinerja cakupan pelayanan administrasi perangkat daerah dengan target kinerja 100 % dan realisasi sebesar 100% dengan capaian sebesar 100%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pilihan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang pada Pemerintahan Kota Metro masih menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Adapun permasalahan dan isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Permasalahan

- Kemantapan jalan kota yang masih dalam kondisi sedang;
- Utilitas sarana dan prasarana jalan belum optimal.;
- Tidak adanya rancangan induk sistem drainase perkotaan dan belum terpadunya sistem drainase kota metro baik sistem drainase perkotaan maupun lingkungan;
- Timbunan sampah yang belum dikelola dengan baik;
- Sistem pengelolaan dan pengembangan layanan air minum belum optimal;

- Sistem Pengelolaan air limbah domestik belum optimal;
- Minimnya pemahaman masyarakat terkait pelayanan perizinan pemanfaatan ruang berbasis elektronik;
- Genangan Banjir yang terjadi di beberapa titik pada saat hujan deras yang dikarenakan tidak terintegrasinya drainase, hilangnya resapan air, dan tidak mempunya sungai dan anak sungai dalam menampung debit air yang ada;
- Banyak jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan sehingga air irigasi tidak sampai ke petak sawah di hilir saluran;
- Jaringan Irigasi Tersier merupakan kewenangan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sehingga Pemerintah Daerah tidak bisa langsung menangani kerusakan jaringan tersier.

Isu Strategis

- Belum optimalnya kondisi mantap jalan kab/kota
- Masih terjadinya genangan air di beberapa wilayah;
- Belum optimalnya pengelolaan sampah perkotaan;
- Menurunnya kuantitas dan kualitas air bersih yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- Minimnya akses sanitasi layak dan aman pada masyarakat;
- Alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;
- Masih rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan
- Optimalisasi Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah untuk Menunjang Kegiatan Sosial Ekonomi
- Sistem drainase Kota Metro baik Sistem Drainase Perkotaan dan Sistem Drainase Lingkungan belum optimal dan terintegrasi;

- Belum optimalnya infrastruktur dan pelayanan pengelolaan air minum;
- Pelayanan perizinan pemanfaatan ruang berbasis elektronik berdasarkan RTRW dan RDTR Kota Metro;
- Pengendalian genangan Banjir di beberapa wilayah rawan banjir di Kota Metro;
- Kurangnya Ketersediaan air pada irigasi pada wilayah administratif Kota Metro akibat belum optimalnya infrastruktur jaringan irigasi tersier

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan SKPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan Renstra, menjadi pedoman penyusunan RENJA Perangkat Daerah serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Rancangan awal Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro tahun 2026 telah disusun dan sebelum ditetapkan menjadi dokumen Renja, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal RKPD Kota Metro dan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD dengan 11 nomenklatur program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional

5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
7. Program Penataan Bangunan Gedung
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungan
9. Program Penyelenggaraan Jalan
10. Program Pengembangan Jasa Kontruksi
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro disajikan dalam Tabel 2.4 di bawah ini:

**Tabel 2.4 RIVIEW TERHADAP RENCANA AWAL RKP
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANGKOTA METRO TAHUN 2026**

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil AnalisisKebutuhan					Catatan Penting	
	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					92.786.171.984,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG					92786171984
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				92.786.171.984,00	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				92.786.171.984,00		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Metro	Nilai Sakip SKPD	75.81	10.783.869.578,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Metro	Nilai Sakip SKPD	75.81	10.783.869.578,00		
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	345.075.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	12 Dokumen	345.075.000,00		
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	24.590.400,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	4 Dokumen	24.590.400,00		
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen</i>	2 Dokumen	23.365.500,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>	2 Dokumen	23.365.500,00		

			<i>Perubahan RKA-SKPD</i>								
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	297.119.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	6 Laporan	297.119.100,00	
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>	100 %	8.135.553.562,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>	100 %	8.135.553.562,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	71 Orang/bulan	6.399.611.262,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	71 Orang/bulan	6.399.611.262,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	1.675.200.000,00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	1.675.200.000,00	
3	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan</i>	5 Laporan	33.184.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan</i>	5 Laporan	33.184.000,00	

			<i>Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>					<i>Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>			
4	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	66 Laporan	27.558.300,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	66 Laporan	27.558.300,00	
C	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>	100 %	24.096.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>	100 %	24.096.000,00	
1	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	71 Dokumen	24.096.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>	71 Dokumen	24.096.000,00	
D	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik</i>	100 %	328.629.650,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Metro	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik</i>	100 %	328.629.650,00	
1	Sub Kegiatan	Kota Metro	<i>Jumlah Paket</i>	10 Paket	37.148.000,00	Penyediaan Komponen	Kota Metro	<i>Jumlah Paket</i>	10	37.148.000,00	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Metro	<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>			Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Metro	<i>Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	Paket		
2	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	14 Paket	37.379.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	14 Paket	37.379.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	120 Paket	104.891.650,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	120 Paket	104.891.650,00	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	60 Paket	17.021.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	60 Paket	17.021.000,00	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	52 Dokumen	53.139.400,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	52 Dokumen	53.139.400,00	
6	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	10 Laporan	52.351.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	10 Laporan	52.351.000,00	
7	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	26.699.600,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	26.699.600,00	
E	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Metro	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik</i>	1 Paket	30.100.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Metro	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan</i>	1 Paket	30.100.000,00	

	Daerah		<i>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			Daerah		<i>Pemerintah Daerah</i>			
1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	30.100.000,00	Pengadaan Mebel	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>	1 Unit	30.100.000,00	
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.192.029.016,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100 %	1.192.029.016,00	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	150 Laporan	12.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	150 Laporan	12.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.157.577.816,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	1.157.577.816,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	41 Laporan	22.451.200,00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Metro	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	41 Laporan	22.451.200,00	
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	<i>Persentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	100 %	728.386.350,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Metro	<i>Persentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>	100 %	728.386.350,00	

1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Metro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.930.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Metro	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	43.930.000,00	
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Metro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	185.150.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Metro	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit	185.150.500,00	
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Metro	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	38.549.980,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Kota Metro	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	4 Unit	38.549.980,00	
4	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20.323.400,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Metro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	20.323.400,00	
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Metro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	440.432.470,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Metro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	440.432.470,00	
II	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Metro	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur	42.94	1.400.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Kota Metro	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	42.94	1.400.000.000,00	

			pengendalian banjir								
A	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangan</i>	30.01 %	950.000.000,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangan</i>	30.01 %	950.000.000,00	
1	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kota Metro	<i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i>	0.26 KM	200.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kota Metro	<i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i>	0.26 KM	200.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Metro	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi</i>	0.35 KM	250.000.000,00	Normalisasi/Restorasi Sungai	Kota Metro	<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstor asi</i>	0.35 KM	250.000.000,00	
3	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Kota Metro	<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>	0.33 KM	400.000.000,00	Pembangunan Tanggul Sungai	Kota Metro	<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>	0.33 KM	400.000.000,00	
4	Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Metro	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	3 Unit	100.000.000,00	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Kota Metro	<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>	3 Unit	100.000.000,00	
B	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas</i>	78.42 %	450.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas</i>	78.42 %	450.000.000,00	
1	Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Metro	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>	0.35 KM	200.000.000,00	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Metro	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>	0.35 KM	200.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan	Kota Metro	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan</i>	0.25 KM	100.000.000,00	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Metro	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan</i>	0.25 KM	100.000.000,00	

	Irigasi Permukaan		<i>yang Direhabilitasi</i>					<i>yang Direhabilitasi</i>			
3	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Metro	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	0.3 KM	50.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Kota Metro	<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	0.3 KM	50.000.000,00	
4	Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya</i>	22 Lembaga	100.000.000,00	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya</i>	22 Lembaga	100.000.000,00	
III	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Metro	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</i>	74.59	6.812.003.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Kota Metro	<i>Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota</i>	74.59	6.812.003.000,00	
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota</i>	149 SR	6.812.003.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota</i>	149 SR	6.812.003.000,00	
1	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air</i>	1 Unit	541.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air</i>	1 Unit	541.000.000,00	

	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			Penyediaan Air Minum (SPAM)		Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara			
2	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Metro	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	149 SR	6.271.003.000,00	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Metro	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	149 SR	6.271.003.000,00	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Metro	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	22.5	1.000.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Metro	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	22.5	1.000.000.000,00	
A	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	1 Unit	1.000.000.000,00	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	1 Unit	1.000.000.000,00	
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Metro	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Metro	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	1 Unit	1.000.000.000,00	
V	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Metro	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75.97	107.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Kota Metro	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75.97	107.000.000,00	
A	Pengelolaan dan	Kota	Jumlah Rumah	349 Rumah	107.000.000,00	Pengelolaan dan	Kota	Jumlah Rumah	349	107.000.000,00	

	Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Metro	<i>Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman</i>	Tangga		Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Metro	<i>Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman</i>	Rumah Tangga		
1	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	70.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>	1 Unit	70.000.000,00	
2	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Kota Metro	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>	10 Rumah Tangga	37.000.000,00	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Kota Metro	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>	10 Rumah Tangga	37.000.000,00	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Metro	<i>Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik</i>	70.50	5.417.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kota Metro	<i>Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik</i>	70.50	5.417.000.000,00	
A	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Kota Metro	<i>Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/</i>	2 Sistem Drainase	5.417.000.000,00	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung	Kota Metro	<i>Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran</i>	2 Sistem Drainase	5.417.000.000,00	

	dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>Pembuangan aliran air tidak tersumbat</i>			dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		<i>air tidak tersumbat</i>			
1	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Metro	<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	500 Meter	300.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Metro	<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	500 Meter	300.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>	1 Sistem Drainase Lingkungan	3.117.000.000,00	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>	1 Sistem Drainase Lingkungan	3.117.000.000,00	
3	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	
4	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>	2 Dokumen	1.000.000.000,00	
5	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Kota Metro	<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	
VII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Metro	<i>Persentase Bangunan Gedung dalam</i>	23.88	21.011.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Kota Metro	<i>Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik</i>	23.88	21.011.000.000,00	

			Kondisi Baik								
A	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung</i>	9 Bangunan Gedung	21.011.000.000,00	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung</i>	9 Bangunan Gedung	21.011.000.000,00	
1	Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>	6 Bangunan Gedung	15.500.000.000,00	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>	6 Bangunan Gedung	15.500.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>	3 Bangunan Gedung	400.000.000,00	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>	3 Bangunan Gedung	400.000.000,00	
3	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	4.946.000.000,00	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>	3 Dokumen	4.946.000.000,00	
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan	Kota Metro	<i>Jumlah Penerbitan</i>	70 Dokumen	165.000.000,00	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan	Kota Metro	<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan</i>	70 Dokumen	165.000.000,00	

	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		<i>Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>			Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG		<i>Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>	en		
VIII	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Metro	<i>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>	33.34	444.000.000,00	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Kota Metro	<i>Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>	33.34	444.000.000,00	
A	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/ Kota dalam kondisi baik</i>	1 Kawasan	444.000.000,00	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/ Kota dalam kondisi baik</i>	1 Kawasan	444.000.000,00	
1	Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>	1 Kawasan	444.000.000,00	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>	1 Kawasan	444.000.000,00	

IX	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Metro	Tingkat Kemandapan Jalan	72.11	44.531.299.406,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Kota Metro	Tingkat Kemandapan Jalan	72.11	44.531.299.406,00	
A	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Tingkat kemandapan jalan</i>	71.18 %	44.531.299.406,00	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Tingkat kemandapan jalan</i>	71.18 %	44.531.299.406,00	
1	Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	387,307 KM	500.000.000,00	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>	387,307 KM	500.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	5.8 KM	2.430.430.406,00	Pemeliharaan Rutin Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>	5.8 KM	2.430.430.406,00	
3	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>	21.3 KM	7.840.000.000,00	Pembangunan Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>	21.3 KM	7.840.000.000,00	
4	Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	34.9 KM	15.450.000.000,00	Rehabilitasi Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>	34.9 KM	15.450.000.000,00	
5	Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	13.5 KM	5.600.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>	13.5 KM	5.600.000.000,00	
6	Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	7.2 KM	12.710.869.000,00	Rekonstruksi Jalan	Kota Metro	<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	7.2 KM	12.710.869.000,00	
X	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Metro	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	50	200.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Kota Metro	Rasio tenaga operator/teknisi/anal isis yang memiliki sertifikat kompetensi	50	200.000.000,00	
A	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Metro	<i>Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi</i>	50 Orang	154.275.000,00	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Kota Metro	<i>Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi</i>	50 Orang	154.275.000,00	
1	Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi	Kota Metro	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi</i>	50 Orang	89.275.000,00	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan	Kota Metro	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan</i>	50 Orang	89.275.000,00	

	Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis		<i>Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>			Operator dan Teknisi atau Analis		<i>Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>			
2	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Metro	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>	50 Orang	65.000.000,00	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Metro	<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>	50 Orang	65.000.000,00	
3	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	10 Dokumen	30.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>	10 Dokumen	30.000.000,00	
4	Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	10 Dokumen	30.000.000,00	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>	10 Dokumen	30.000.000,00	
B	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>	185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan</i>	185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan</i>	185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	

			<i>Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>					<i>Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>			
11,	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Metro	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang	89	1.080.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Kota Metro	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang	89	1.080.000.000,00	
A	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</i>	2 Dokumen	80.000.000,00	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</i>	2 Dokumen	80.000.000,00	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Metro	<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	2 Laporan	80.000.000,00	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Kota Metro	<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>	2 Laporan	80.000.000,00	
B	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>	1 Dokumen	350.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>	1 Dokumen	350.000.000,00	
1	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Metro	<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>	1 Dokumen	350.000.000,00	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Kota Metro	<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>	1 Dokumen	350.000.000,00	
C	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan</i>	2 Dokumen	650.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan</i>	2 Dokumen	650.000.000,00	

	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		<i>Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>			Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		<i>Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>	en		
1	Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	2 Dokumen	200.000.000,00	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Metro	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>	2 Dokumen	200.000.000,00	
2	Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Metro	<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>	1 Dokumen	100.000.000,00	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Kota Metro	<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>	1 Dokumen	100.000.000,00	
3	Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR	Kota Metro	<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR</i>	1 Dokumen	350.000.000,00	Penilaian Perwujudan RTR	Kota Metro	<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR</i>	1 Dokumen	350.000.000,00	
					92.786.171.984,00					92.786.171.984,00	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan dan program kegiatan masyarakat yang dimaksud adalah program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan pelayanan SKPD, baik dari masyarakat, LSM, asosiasi – asosiasi, maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD dari penelitian dan pengamatan lapangan, serta dari pelaksanaan musrenbang.

Dalam hal ini Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro memperoleh usulan pemangku kepentingan dari musrenbang, reses dewan, proposal dan surat pengajuan masyarakat, penelitian dan pengamatan lapangan.

Usulan pemangku kepentingan yang telah diajukan kepada Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Metro baik melalui musrenbang, reses dewan dan proposal/surat pengajuan dari masyarakat akan disurvei serta dilakukan pengamatan langsung di lapangan dan disesuaikan dengan Kriteria Penentuan Skala Prioritas Perencanaan, yang telah disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas PU Dan Tata Ruang Kota Metro. Berdasarkan beberapa hal tersebut kemudian akan disusun urutan prioritas penanganan bagi masing-masing usulan untuk akuntabilitas pemilihan usulan yang dilaksanakan.

Sekitar 70% hasil usulan masyarakat melalui forum MUSRENBANG akan menjadi bagian dari pelaksanaan program/kegiatan SKPD Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro yang usulan prioritasnya mempertimbangkan prioritas usulan dari kewilayahan serta kemudian dilakukan pengurutan melalui perhitungan bobot dan nilai sebagai penentu urutan prioritas dalam penanganan, sisanya didasarkan pada perhitungan teknis dan program *topdown* yang telah dituangkan di dalam dokumen RPJMD.

Proses penganggaran partisipatif ini menyediakan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan mereka pada pihak pemerintah. Proses Musrenbang juga terjadi di level kelurahan , kecamatan

dan kota demikian pula di provinsi dan nasional. Musrenbang merupakan pendekatan *bottom-up* di mana suara masyarakat bisa secara aktif mempengaruhi rencana anggaran kota dan bagaimana proyek-proyek pembangunan disusun. Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 2. 5 dibawah ini:

Tabel 2.5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

No	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		Rasio luas wilayah Tidak terjadigenangan > 2 kali setahun	15%	
	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah bangunan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai yang dikelola pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.62 Km	
	Sub Kegiatan Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	1 Unit	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Kecamatan Metro Pusat	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	0.02 KM	
		Kelurahan Imopuro			
		1 Pengangkutan Lumpur JI Diponegoro			
		2 Pengangkutan Lumpur JI Cut Nyak Dien			
		Kecamatan Metro Selatan			
		Kelurahan Margorejo			
		1 Pengerukan dan Talud Anak Sungai dari RW 1 sampai RW 6			
		2 Bronjong Jl. Apel RW 005 dan 06			
	Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai		Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Dir estorasi	0.4 KM	

		Kecamatan Metro Barat			
		Kelurahan Ganjarasri			
		1 Normalisasi Anak Sungai Rw. 001 s.dRw 11 Kel. Ganjarasri			
		Kecamatan Metro Selatan			
		Kelurahan Rejomulyo			
		1 Normalisasi Pembuangan Air Jl. Budi Utomo RW 001			
	Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai	Kecamatan Metro Pusat	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	0.8 KM	
		Kelurahan Iringmulyo			
		1 Saluran Talud Sungai Way Batanghari Jl. Pala VI ke Pala Raya RT 013			
	Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Sistem Irigasi Primer dan Sekunder yang dikembangkan dan dikelola pada Daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	0.14 Km	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.2 KM	
	Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	0.02 KM	
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM		Cakupan penduduk dengan akses air minum layak	2951 SR	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kab/Kota	1 Unit	
	Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	50 SR	

4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE		Persentase drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	80%	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	4.7 Km	
	Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Kecamatan Metro Utara	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	4500 M Sistem Drainase Perkotaan	
		Kelurahan Banjarsari			
		1 Drainase Jl. Kartini RT. 11, RT. 14 RW. 03			
		2 Drainase Jl. SMPN 6 RT. 15 RW. 04			
		Kelurahan Karangrejo			
		1 Drainase Jl. WrSupratman RW. 10 Kelurahan Karangrejo			
		2 Drainase Jl. WrSupratman RW. 03 Kelurahan Karangrejo			
		Kecamatan Metro Barat			
		Kelurahan Mulyojati			
		1 Jalan Al Muttaqin 2 RT 05 RW 02 Kel. Mulyojati			
		Kelurahan Hadimulyo Barat			
		1 Drainase Jl. Poksai Utama RT. 18 RW.04			
		2 Drainase Jl. Lukman Tanjung RT. 35b RW.09			
		Kelurahan YOSOMULYO			
		1 Drainase Jl. Cempaka Utama dan 1d.d 12 RT 33b/RW.11			
		Kecamatan Metro Timur			
		Kelurahan Tejoagung			
		1 Pembangunan Drainase Jl. Villa Mas RT 31 RW 07 Kelurahan Tejo Agung			
		Kelurahan Yosorejo			
		1 Peninggian Drainase RW 09 Samping Wihara			
		2 Drainase Tertutup Gg. Salon Nita			
		3 Drainase Tertutup Gg. Damai RW 06			
		Kelurahan Iringmulyo			
		1 Drainase Gg. Harapan Indah RT 07/RW 04			

		Kecamatan Metro Selatan			
		KelurahanMargorejo			
		1 Pembangunan Gorong-gorong (2 fungsi) RT 8 RW 2			
	Sub KegiatanOperasi dan PemeliharaanSistemDrainasePerkotaan	Kecamatan Metro Barat	JumlahSistemDrainasePerkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	200 M SistemDrainasePerkotaan	
		Kecamatan Metro Timur			
		KelurahanYosorejo			
		1 Perbaikansalurandrainase RW 05			
		Kelurahan Yosodadi			
		1 PerbaikanDrainaseJl.Nangka RT 40 RW 09			
		Kecamatan Metro Utara			
		KelurahanPurwosari			
		1 PerbaikanDrainase Jl. Kucing RW. 07 Kel Purwosari			
3	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG		RasioBangunanber-IMB per satuanbangunan	15%	
	KegiatanPenyelenggaraanBangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, PemberianIzinMendirikanBangunan (IMB) dan Sertifikat Laik FungsiBangunan Gedung		JumlahBangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arahan Rencana Tata Ruang dan PenataanBangunan Gedung	70 PBG/SLF	
	Sub KegiatanPemeliharaan, Perawatan, dan PemeriksaanBerkalaBangunan Gedung untukKepentinganStrategis Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Metro Barat	JumlahBangunan Gedung untukKepentingan StrategisKabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan DiperiksaBerkala	2 Bangunan Gedung	
		KelurahanGanjaragung			
		1 Rehappembangunangedungkantor dan aula kelurahan			
		Kecamatan Metro Timur			
		KelurahanTejosari			
		1 Rehab Lantai dan Pelapon Aula KelurahanTejosari Aula KelurahanTejosari			
		KelurahanYosorejo			
		1 Rehab Gadung Kantor Kelurahan Yosorejo			
		2 Rehab Gadung PKK Kel. Yosorejo			
		Kecamatan Metro Selatan			
		KelurahanRejomulyo			
		1 Rehab Aula KelurahanRejomulyo			

		Kecamatan Metro Utara			
		Kelurahan Purwoasri			
		1 Rehab Aula Kelurahan Purwoasri Jl. Beruang No 1			
	Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	13 Dokumen	
		Kecamatan Metro Utara			
		Kelurahan Banjarsari			
		1 Pembangunan Kantor Kelurahan Banjarsari			
		Kecamatan Metro Timur			
		Kelurahan Yosorejo			
		1 Pembangunan Pagar Kelurahan Yosorejo (samping)			
		Kecamatan Metro Selatan			
		1 Pembangunan Stadion Mini dan Tribun Penonton Jl. Gembira RT. 005 dan 006 RW. 002			
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN				
	Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				
	Sub Kegiatan Pengelolaan Leger Jalan		Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	0	
	Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	Kecamatan Metro Utara	Panjang jalan yang di bangun	2,3 KM	
		Kelurahan Purwoasri			
		1 Hotmix RW 5, 6, 7, 8			
		2 Hotmix Lanjutan RT 11 RW. 03			
		3 Hotmix Jl. Sirtilnduk RT. 25 RW. 07			
		Kelurahan Karangrejo			
		1 Hotmix Jl. Merpati 7 RW 11			
		2 Hotmix Jl. Anggrek RW 08			
		3 Pembangunan Cor Blok Lanjutan Jl. Delima 2 RW 02			
		4 Pembangunan Onderlag Jl. Merpati RT 44 RW 11			
		5 Pembangunan Onderlag RT. 35 RW.09			
		Kecamatan Metro Barat			
		Kelurahan Mulyojati			
		1 Rekonstruksijalan Al Muttaqin 2 RT 05 RW 02			

		Kelurahan Ganjar Asri		
		1 Pelebaran jalan Khairberas Perbatasan RW 001, RW 002, RW. 003, RW. 004, RW.005		
		Kecamatan Metro Pusat		
		Kelurahan Hadimulyo Barat		
		1 Hotmix Jalan Kalimantan RT.03 RW. 01A		
		2 Hotmix Jl. Natuna RT. 10 RW. 02		
		3 Corblok Belakang Pabrik Tomo RT. 22 RW 05		
		4 Corblok Jl. Bambu Kuning RT. 265 Rw. 06		
		Kecamatan Metro Pusat		
		Kelurahan YOSOMULYO		
		1 Pembangunan Jalan Usaha Tani (Jl. Markisa)		
		2 Pembangunan Bahu Jalan Kedondong dang Nangka RW. 07		
		3 Pembangunan Hotmix Jl. Pingle RW. 002		
		Kecamatan Metro Timur		
		Kelurahan Tejosari		
		1 Pengaspalan Jalan Jl. Madukoro RW. 005		
		2 Pembangunan Jalan hotmix Jalan Kantil RT 009 RW 003		
		3 Pembangunan Jalan Hotmix Jl. Gurame RT.12 RW.004		
		4 Pengaspalan Jalan Jeruk RT 020 RW 007		
		Kelurahan Yosorejo		
		1 Jalan Gn Lawu III RW 09 Belakang Taman Edukasi		
		Kelurahan Iringmulyo		
		1 Pengaspalan Jalan Gg. Kutilang 8 RT 10 RW 05		
		2 Jalan Palapa III Gg. Jupiter III RT 38 RW 17		
		3 Perbaikan Trotoar dan Pengangkatan Endapan Jl. A. Yani RT 30/RW 14		
		Kecamatan Metro Selatan		
		Kelurahan Margorejo		
		1 Hotmix Jalan Pingle melewati RW, 01 RT. 02,03,04		
		2 Pengaspalan Jalan Hotmix Jl. Willis 1 dan 2		
		3 Pembangunan Jl. Hotmix Jl. Merbabu RT 3		
		Kelurahan Margodadi		
		1 Pengaspalan Jalan Nusantara Tengah melewati RT 09,10,11,12		

		di RW 03		
		2 Onderlah Jalan Nusantara 7 RT 13 RW 03		
		KelurahanSumbersari		
		1 Pembangunan Jl. Hotmix Jl. Husodo/FKPPi RW 001 s/d RW 002		
		2 Onderlaag + Penetrasi Jl. Ponpes Tri Bhakti Uqwah RT 29 RW 007		
	Sub KegiatanRekonstruksi Jalan	Kecamatan Metro Barat	<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>	2 KM
		KelurahanGanjar Agung		
		1 Peningkatan Jalan Kaca Piring RT. 39 RW. 13		
		Kecamatan Metro Selatan		
		KelurahanRejomulyo		
		1 RekonstruksijalanPattimura II RW 02- RW 005		
		Kelurahan Yosorejo		
		1 Pelebaran Jalan Rabat Beton Jl. Mahakam (lanjutan)		
	Sub KegiatanPemeliharaan Berkala Jalan	Kecamatan Metro Barat		
		KelurahanMulyosari		
		1 Jalan Proklamasi (DepanPondok AT-Tanwir)		
		2 Jalan Sumpah Pemuda RT. 008 RW. 002		
		KelurahanMulyojati		
		Jalan Gotong Royong RW 01 Tembus RW 02		
		Kecamatan Metro Timur		
		KelurahanYosorejo		
		1 Jalan Mahakam TembusanRawasari		
		2 Rehab Jalan Hotmix Jl. Terusan Way Gayausamping Makam Imopuro		
		3 Rehab Jalan Hotmix Jl. Tulang Bawang RT 13 RW 04		
		Kelurahan Tejosari		
		1 Perbaikan Jalan Depan Masjid RW 002 RT 007		
		Kelurahaniringmulyo		
		1 Perbaikanjalan Jl. Sawi RT 28 RW 13		
		2 Perbaikanjalan Jl. Tawes RW 09 Kel. Iringmulyo RW 09		
	Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan		JumlahJembatan yang Dibangun	4

Sub Kegiatan	Rehabilitasi Jalan	Kecamatan Metro Barat		
		Kelurahan Ganjarasri		
		1 Rehabilitasi jalan Khairbras RW. 01, 02, 03, 04,05		
		Kelurahan Ganjar Agung		
		Rehabilitasi jalan Pajajaran RT.14 RW.05		
		Kelurahan Mulyosari		
		Rehabilitasi jalan Makam RT.12 RW. 003		
		Kelurahan Mulyojati		
		Rehabilitasi jalan Thamsir RT.18 RW.04		
		Kecamatan Metro Pusat		
		Kelurahan Imopuro		
		1 Rehab. Jl. Tengku Umar		
		2 Rehab. Jl. Maulana RT 15		
		3 Rehab. Jl. Bandar Marga RT. 021		
		Kelurahan Yosomulyo		
		1 Rehabilitasi Hotmix Jl. Mengkudu RW. 012 RW.014		
		Kecamatan Metro Timur		
		Kelurahan Tejosari		
		1 Perbaikan Jalan Rusak RW 007 RT 019 Gg SD 8		
		Kelurahan Tejoagung		
		1 Rehabilitasi Belakang SD 10 Metro timur RT 07,08		
		Kecamatan Metro Utara		
		Kelurahan Purwoasri		
		1 Rehabilitasi Onderlag Jl. Seriri 2 RT 28 RW 08		
		Kelurahan Karangrejo		
		1 Rehabilitasi onderlag Jl. Tersier RT.13 RW.4		
		2 Rehabilitasi onderlag Jl. Merpati RW.11		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan perencanaan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan.

Telaahan terhadap kebijakan Nasional sesuai dengan Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2026 " Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif", sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang mengacu pada visi misi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Prioritas pembangunan tahun 2026 menekankan tiga pesan utama yaitu meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air; mendorong produktivitas ekonomi melalui hilirisasi, transformasi digital, dan penguatan daya saing; serta menjamin inklusivitas pembangunan agar tidak ada warga yang tertinggal. Program prioritas unggulan yang diusung antara lain Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan 3 juta unit rumah, Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Digitalisasi Pendidikan, Program Pengurangan Kemiskinan Terpadu, serta Pengelolaan Sampah Terpadu. Program-program tersebut telah dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung transformasi struktural menuju Indonesia Emas dan beberapa diantaranya saat ini sedang dilaksanakan dan menuju arah yang lebih baik. Pemerintah menetapkan 8 Prioritas Nasional (PN) dalam RKP 2026 yang meliputi:

- Prioritas Nasional 1, Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia);

- Prioritas Nasional 2, Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
- PN 3 adalah melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
- PN 4 memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas;
- PN 5 melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
- PN 6 upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan;
- PN 7 adalah pemerintahan baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
- PN 8 adalah memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan yang diprioritaskan di tahun 2026, telah ditetapkan beberapa target pembangunan, diantaranya meneguhkan kedaulatan pangan, energi, dan air melalui upaya swasembada pangan dan energi melalui

ekonomi hijau, mendorong produktivitas Ekonomi melalui upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui hilirisasi industri, transformasi digital, dan peningkatan daya saing dan menjamin pembangunan inklusif melalui upaya memastikan tidak ada warga yang tertinggal dengan program seperti pengentasan kemiskinan, pembangunan 3 juta unit rumah, dan penguatan koperasi.

Agenda pembangunan ini diturunkan kedalam program prioritas dan strategi pendukung:

Program Prioritas Unggulan :

- Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Untuk peningkatan kualitas gizi dan kesehatan masyarakat.
- Pembangunan 3 Juta Unit Rumah: Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penyediaan hunian.
- Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat: Penguatan ekonomi lokal dan transformasi digital pendidikan.
- Pengelolaan Sampah Terpadu: Mendorong upaya keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan

Strategi Pendukung :

- Sinkronisasi RKP dan APBN:
Memastikan sinergi antara perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pencapaian prioritas nasional.
- Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah:
Mendorong kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi.
- Kolaborasi Multipihak:
Memperkuat partisipasi publik dan sinergi kelembagaan untuk memastikan pembangunan dirasakan merata.
- Transformasi Digital:
Menerapkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor strategis.

Pemerintah Provinsi sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat dan memiliki kewenangan untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan, menjadi salah satu acuan pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan selama 5 tahun kedepan. Sebagai satu kesatuan wilayah di Provinsi Lampung, seluruh kabupaten/kota wajib mengacu rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dalam RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029 dengan tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah.

Tema Pembangunan Provinsi Lampung pada Tahun 2026 yaitu Penguatan Ketahanan Pangan dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tema ini sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional 2026, yaitu "Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Beberapa prioritas pembangunan Lampung untuk tahun 2026 mencakup fokus pada pendidikan gratis, infrastruktur, dan pemulihan ekonomi. Pembangunan juga akan diarahkan untuk mendorong ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif; memperkuat sumber daya manusia; serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang efektif. Selain itu, optimalisasi sektor unggulan daerah, penguatan konektivitas, dan percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital akan didorong. Tujuh (7) prioritas arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung pada tahun 2026 yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan Mendukung Fungsi Sosial dan Ekonomi ;
2. Penguatan SDM Yang Unggul dan Inovatif;
3. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penguatan Hilirisasi;
4. Pengentasan Kemiskinan;
5. Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas;.
6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan;.

7. Peningkatan Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis, Aman Dan Berbudaya.

Tahun 2026 menjadi momentum awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung periode 2025–2029. Pada saat penyusunan perubahan RKPd ini, dokumen RPJMD 2025–2029 masih berada pada tahap perumusan, yakni dalam bentuk Rancangan RPJMD. Namun demikian, arah kebijakan yang termuat dalam visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka menengah telah mulai diintegrasikan ke dalam substansi Perubahan RKPd Tahun 2026. Sebagai landasan pembangunan jangka menengah, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2025–2029, yaitu “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”, menjadi arah utama pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya mencerminkan semangat kemandirian dan kemajuan Lampung, tetapi juga menjadi bagian dari kontribusi nyata daerah dalam mewujudkan cita-cita besar pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian indikator keberhasilan RPJMD Nasional, RPJMD Provinsi Lampung serta RPJMD

Kota Metro Tahun 2026 serta dalam rangka menghadapi permasalahan, isu-isu strategis, tantangan dan peluang perubahan yang akan terjadi sesuai tugas dan fungsi Dinas PUTR Kota Metro sekaligus upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dimana misi yang menjadi urusan Dinas PUTR Kota Metro adalah misi keempat yaitu **“Membangun Infrastruktur Perkotaan Yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”**

Dalam RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator tujuan/sasaran yang menjadi urusan Dinas PUTR Kota Metro, yaitu **Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan Perkotaan yang inklusif dan Berkelanjutan** dengan indikator tujuan/sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas ,meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan infrastruktur perkotaan serta terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang

Berdasarkan visi dan misi dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3-1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN KE-					KON DISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Meningkatkan Kualitas Lingkungan		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) bidang PUTR	0,559	0,598	0,640	0,686	0,734	0,786

	Perkotaan yang Inklusif dan Berkelanjutan								
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dinas	Nilai SAKIP	74,31	75,81	77,31	78,81	80,31	81,81
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Layanan Infrastruktur Perkotaan	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	33,37 %	42,94 %	45,96 %	52,65 %	55,51 %	58,04 %
			Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70,25 %	70,50 %	71%	71,50 %	72%	72,50 %
			Tingkat kemantapan jalan	71,11 %	72,11 %	73,11 %	74,11 %	75,11 %	76,11 %
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74,33 %	74,59 %	78,85 %	75,11 %	75,36 %	75,62 %

			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,64 %	75,97 %	76,30 %	76,64 %	76,97 %	77,30 %
			Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	13,50 %	22,50 %	31,50 %	40,50 %	49,50 %	58,50 %
			Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik i	17,91 %	23,88 %	29,85 %	35,82 %	41,79 %	47,76 %
			Rasio tenaga operator/tek nisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	48%	50%	52%	54%	56%	58%
		Terwujudnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	Persentase ruang publik yang berubah peruntukkan nya	88%	89%	90%	91%	92%	93%

3.3 Program dan Kegiatan

Perumusan rancangan awal rencana kerja program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2026 mempertimbangkan visi, misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dan program prioritas kepala daerah yang

tercantum di dalam RPJMD 2025-2029. Rumusan Rencana Progan dan Kegiatan Perangkat Derah Tahun 2026 dan Prekiraan Maju Tahun 2027 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro dapat dilihat pada tabel 3.1.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3. Sub Kegiatan Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 4. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 1. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
 2. Sub Kegiatan Normalisasi/Restorasi Sungai
 3. Sub Kegiatan Pembangunan Tanggul Sungai
 4. Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya
 2. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota
 1. Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
 2. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 3. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 4. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/Kota
 1. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 2. Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
4. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 1. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
5. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 1. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Unit pengolahan setempat
6. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 1. Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase Yang Terhubung Langsung Dengan Sungai Dalam Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan
 2. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan
 3. Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan
 4. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan
 5. Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan
7. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
 1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 1. Sub Kegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota

3. Sub Kegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG
8. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
1. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungannya Di Daerah Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 3. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 4. Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 5. Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 6. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
10. PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI
1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 1. Sub Kegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis
 2. Sub Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis

2. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota
 3. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 1. Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota
11. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
1. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota
 1. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
 2. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota
 1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
 2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota
 1. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 2. Sub Kegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
 3. Sub Kegiatan Penilaian Perwujudan RTR

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	7	8	9	11	12	15	16
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG				92.786.171.984,0 0				43.274.212.975,00
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				92.786.171.984,0 0				43.274.212.975,00
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				92.786.171.984,0 0				43.274.212.975,00
1,	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-		-	10.783.869.578,0 0			-	11.540.300.124,00
		[Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien]	Nilai Sakip SKPD	74.31	75.81	10.783.869.578,0 0	-	-	-	11.540.300.124,00

1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>		12 Dokumen	345.075.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	291.487.530,00
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
		<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>		4 Dokumen	24.590.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		25.670.000,00
1.03.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								

			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>		2 Dokumen	23.365.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		25.702.160,00
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		6 Laporan	297.119.100,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		240.115.370,00

1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>		100 %	8.135.553.562,00		Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	8.378.372.423,00
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
		<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>		71 Orang/bula n	6.399.611.262,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		6.130.475.893,00
1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

		<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>		12 Dokumen	1.675.200.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		2.158.200.000,00
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
		<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		5 Laporan	33.184.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		48.822.400,00
1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								

			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>		66 Laporan	27.558.300,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		40.874.130,00
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik</i>		100 %	24.096.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	53.603.990,00
	1.03.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>		71 Dokumen	24.096.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		53.603.990,00
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan Baik</i>		100 %	328.629.650,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	380.801.376,00
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								

			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>		10 Paket	37.148.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		40.862.800,00
1.03.01.2.06.000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		14 Paket	37.379.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan membangun industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		81.726.843,00
1.03.01.2.06.000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor									

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>		120 Paket	104.891.650,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		110.151.525,00
	1.03.01.2.06.000 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>		60 Paket	17.021.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		17.623.100,00
	1.03.01.2.06.000 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								

			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>		52 Dokumen	53.139.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	0	37.788.608,0
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>		10 Laporan	52.351.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	0	56.679.600,0
1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD									

			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>		1 Dokumen	26.699.600,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		0	35.968.900,0
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>		1 Paket	30.100.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	0	33.153.120,0
	1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel									

			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>		1 Unit	30.100.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		33.153.120,00
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>		100 %	1.192.029.016,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1.307.931.917,00
	1.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								

		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>		150 Laporan	12.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		11.000.000,00
1.03.01.2.08.000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
		<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>		12 Laporan	1.157.577.816,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		1.273.335.597,00
1.03.01.2.08.000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>		41 Laporan	22.451.200,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		23.596.320,00
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Barang Milik Daerah Sebagai Penunjang Urusan Permerintah Daerah yang Terpelihara Dengan Baik</i>			100 %	728.386.350,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1.094.949.768,00
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

		<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>		1 Unit	43.930.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		47.773.000,00
1.03.01.2.09.000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
		<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>		22 Unit	185.150.500,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		429.072.050,00
1.03.01.2.09.000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar								

			<i>Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya</i>		4 Unit	38.549.980,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		42.404.978,00
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>		40 Unit	20.323.400,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		22.355.740,00
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>		4 Unit	440.432.470,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		553.344.000,00
2,	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-		-	1.400.000.000,00			-	1.670.900.000,00
		[Meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi]	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	33.37	42.94	1.400.000.000,00	-	-	-	1.670.900.000,00
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangan</i>		30.01 %	950.000.000,00		Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1.560.900.000,00
	1.03.02.2.01.0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai								

			<i>Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara</i>		0.26 KM	200.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		111.100.000,00
	1.03.02.2.01.009 3	Normalisasi/Restorasi Sungai								
			<i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>		0.35 KM	250.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		330.000.000,00
	1.03.02.2.01.011 5	Pembangunan Tanggul Sungai								

			<i>Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun</i>		0.33 KM	400.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		902.000.000,00
1.03.02.2.01.012 1	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya									
			<i>Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun</i>		3 Unit	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		217.800.000,00

1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas</i>		78.42 %	450.000.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	110.000.000,00
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan								
		<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan</i>		0.35 KM	200.000.000,00	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		0,00
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan								

			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi</i>		0.25 KM	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		110.000.000,00
1.03.02.2.02.002 1	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan									
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>		0.3 KM	50.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		0,00
1.03.02.2.02.003 0	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota									

			<i>Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya</i>		22 Lembaga	100.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		0,00
3,	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-		-	6.812.003.000,00			-	1.406.326.705,00
		[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum]	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	74.33	74.59	6.812.003.000,00	-	-	-	1.406.326.705,00

1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kab/ Kota</i>		149 SR	6.812.003.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan me nge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	1.406.326.705,00
1.03.03.2.01.002 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
		<i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>		1 Unit	541.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan me nge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		641.300.000,00
1.03.03.2.01.003 2	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan								

			<i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i>		149 SR	6.271.003.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembang industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		765.026.705,00
4,	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-		-	1.000.000.000,00			-	95.047.920,00
		[Meningkatkan layanan persampahan regional]	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	13.5	22.5	1.000.000.000,00	-	-	-	95.047.920,00
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola</i>		1 Unit	1.000.000.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan mengembang industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	95.047.920,00

	1.03.04.2.01.001 7	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS								
			<i>Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan</i>		1 Unit	1.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.		95.047.920,00
5,	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-		-	107.000.000,00			-	187.811.844,00
		[Meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah]	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75.64	75.97	107.000.000,00	-	-	-	187.811.844,00

1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman</i>		349 Rumah Tangga	107.000.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan me ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	187.811.844,00
1.03.05.2.01.003 8	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)								
		<i>Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>		1 Unit	70.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan me ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		90.750.000,00
1.03.05.2.01.004 4	Penyediaan Unit pengolahan setempat								

			<i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.</i>		10 Rumah Tangga	37.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		97.061.844,00
6,	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	-		-	5.417.000.000,00			-	6.870.465.877,00
		[Meningkatkan kualitas sistem drainase perkotaan]	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	70.25	70.50	5.417.000.000,00	-	-	-	6.870.465.877,00
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/ Pembuangan aliran air tidak tersumbat</i>		2 Sistem Drainase	5.417.000.000,00		-	-	6.870.465.877,00

1.03.06.2.01.001 9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan									
			<i>Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>		500 Meter	300.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		330.000.000,00
1.03.06.2.01.002 1	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan									
			<i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i>		1 Sistem Drainase Lingkungan	3.117.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		3.428.700.000,00
1.03.06.2.01.002 4	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan									

			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>		1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembang kan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		3.103.780.240,00
1.03.06.2.01.003 0	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan									
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i>		2 Dokumen	1.000.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-		0,00
1.03.06.2.01.003 1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan									

			<i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i>		1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		7.985.637,00
7,	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	-		-	21.011.000.000,00			-	5.554.897.296,00
		[Meningkatnya kualitas bangunan gedung]	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	17.91	23.88	21.011.000.000,00	-	-	-	5.554.897.296,00
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	<i>Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB sesuai dengan Arah an Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung</i>		9 Bangunan Gedung	21.011.000.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	5.554.897.296,00
	1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>		6 Bangunan Gedung	15.500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		3.735.395.719,00
1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>		3 Bangunan Gedung	400.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		504.726.577,00
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota									

			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>		3 Dokumen	4.946.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		1.100.000.000,00
	1.03.08.2.01.002 3	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG								
			<i>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG</i>		70 Dokumen	165.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		214.775.000,00
8,	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	-		-	444.000.000,00			-	374.516.780,00
		[Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata]	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	16.67	33.34	444.000.000,00	-	-	-	374.516.780,00

	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/Kota dalam kondisi baik</i>		1 Kawasan	444.000.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan me nge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	374.516.780,00
	1.03.09.2.01.001 1	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota								
			<i>Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan</i>		1 Kawasan	444.000.000,00	DANA BAGI HASIL (DBH)	Melanjutka n hilirisasi dan me nge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		374.516.780,00
9,	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	-		-	44.531.299.406,00			-	14.120.519.539,00
		[Meningkatkan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman]	Tingkat Kemantapan Jalan	71.11	72.11	44.531.299.406,00	-	-	-	14.120.519.539,00

1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Tingkat kemantapan jalan</i>		71.18 %	44.531.299.406,00		Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	14.120.519.539,00
1.03.10.2.01.004 3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan								
		<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>		387,307 KM	500.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		247.500.000,00
1.03.10.2.01.005 1	Pemeliharaan Rutin Jalan								

			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>		5.8 KM	2.430.430.406,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		231.620.400,00
1.03.10.2.01.005 3	Pembangunan Jalan									
			<i>Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan</i>		21.3 KM	7.840.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		2.422.306.920,00
1.03.10.2.01.005 5	Rehabilitasi Jalan									

			<i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>		34.9 KM	15.450.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		4.286.117.786,00
1.03.10.2.01.005 6	Pemeliharaan Berkala Jalan									
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i>		13.5 KM	5.600.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		3.046.363.870,00
1.03.10.2.01.005 9	Rekonstruksi Jalan									

			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>		7.2 KM	12.710.869.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		3.886.610.563,00
10,	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	-		-	200.000.000,00			-	287.976.890,00
		[Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi]	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	48	50	200.000.000,00	-	-	-	287.976.890,00
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi</i>		50 Orang	154.275.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	199.650.000,00

1.03.11.2.01.001 0	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis									
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi</i>		50 Orang	89.275.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		110.000.000,00
1.03.11.2.01.001 6	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis									
			<i>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih</i>		50 Orang	65.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	0	89.650.000,0

1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</i>		10 Dokumen	30.000.000,00		Melanjutka n hilirisasi dan me nge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-	0	55.000.000,0
1.03.11.2.02.001 3	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota									
		<i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i>		10 Dokumen	30.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan me nge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.		0	55.000.000,0

1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	<i>Jumlah Paket Pekerjaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi</i>		185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00		Melanjutka n pengemb angan infrastruktu r dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-	33.326.890,00
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota								

			<i>Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan</i>		185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.		33.326.890,00
11,	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	-		-	1.080.000.000,00			-	1.165.450.000,00
		[Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang]	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang	88	89	1.080.000.000,00	-	-	-	1.165.450.000,00

1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota</i>		2 Dokumen	80.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	89.100.000,00
1.03.12.2.01.0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang								
		<i>Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</i>		2 Laporan	80.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		89.100.000,00

1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>		1 Dokumen	350.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	385.000.000,00
1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang								
		<i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>		1 Dokumen	350.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		385.000.000,00

1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kab/Kota</i>		2 Dokumen	650.000.000,00		Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-	691.350.000,00
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang								
		<i>Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang</i>		2 Dokumen	200.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		328.350.000,00
1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK								

			<i>Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang</i>		1 Dokumen	100.000.000,00	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		110.000.000,00
1.03.12.2.04.0012	Penilaian Perwujudan RTR									
			<i>Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR</i>		1 Dokumen	350.000.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		253.000.000,00
	JUMLAH						92.786.171.984,00			43.274.212.975,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN

PENDANAAN PERANGKAT

DAERAH

Untuk rancangan awal rencana kerja tahun 2026, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro merencanakan 11 program, 22 kegiatan dan 62 sub kegiatan dengan kebutuhan anggaran keseluruhan Rp. 92.786.171.984,- Adapun rincian adalah sebagaimana berikut:

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	LOKASI	RENCANA TAHUN 2026		
				TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	4	5	6	6	8
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR					
1 03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	Tersedianya Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Kota Metro	11 Program	92.786.171.984	
1 03 01 2.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien	Kota Metro	75,81	10.783.869.578,00	PAD
1 03 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Metro	12 dokumen	345.075.000,00	PAD

1	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Metro	4 Dokumen	24.590.400,00	PAD
1	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Metro	2 Dokumen	23.365.600,00	PAD
1	03	01	2.01	06	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Metro	6 laporan	297.119.100,00	PAD
	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	Kota Metro	100%	8.135.553.562,00	PAD/DAU
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Metro	71 orang/bulan	6.399.611.262,00	DAU
1	03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kota Metro	12 dokumen	1.675.200.000,00	DAU

1	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Metro	5 laporan	33.184.000,00	PAD
1	03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Metro	66 laporan	27.558.300,00	PAD
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Dilaksanakan dengan baik	Kota Metro	100%	24.096.000,00	
1	03	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Metro	71 Dokumen	24.096.000,00	PAD
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat daerah yang dilaksanakan dengan baik	Kota Metro	100%	328.629.650,00	PAD

1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	10 paket	37.148.000,00	PAD
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	14 paket	37.379.000,00	PAD
1	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Metro	120 paket	104.891.650,00	PAD
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Metro	60 paket	17.021.000,00	PAD
1	03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Metro	52 dokumen	53.139.400,00	PAD
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Metro	10 laporan	52.351.000,00	PAD
1	03	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Metro	1 dokumen	26.699.600,00	PAD
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Kota Metro	1 Paket	30.100.000,00	PAD
1	03	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	Kota Metro	1 Unit	30.100.000,00	PAD

1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Metro	100%	1.192.029.016,00	PAD
1	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Metro	150 laporan	12.000.000,00	PAD
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Metro	12 laporan	1.157.577.816,00	PAD
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Metro	41 laporan	22.451.200,00	PAD
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah sebagai penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	Kota Metro	100%	728.386.350,00	PAD
1	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	1 Unit	43.930.000,00	PAD
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Metro	22 Unit	185.150.500,00	PAD

1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Metro	4 unit	38.549.980,00	PAD
1	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Metro	40 unit	20.323.400,00	PAD
1	03	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Metro	4 Unit	440.432.470,00	PAD
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio luas kawasa pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Kota Metro	42,94%	1.400.000.000,00	DAU
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Kawasan Rawan Banjir yang ditangani	Kota Metro	42,94%	950.000.000,00	DAU
1	03	02	2.01	80	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Metro	0,26 Km	200.000.000,00	DAU
1	03	02	2.01	93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai Yang di Normalisasi/ Direstorasi	Kota Metro	0,35 Km	250.000.000,00	DAU
1	03	02	2.01	115	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai Yang Dibangun	Kota Metro	0,33 Km	400.000.000,00	DAU
1	03	02	2.01	121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Kota Metro	3 Unit	100.000.000,00	DAU

1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Kota Metro	78,42%	450.000.000,00	PAD
1	03	02	2.02	08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Kota Metro	0,1 Km	200.000.000,00	PAD
1	03	02	2.02	001 4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Metro	0,05 Km	100.000.000,00	DAU
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	0,05 Km	50.000.000,00	PAD
1	03	02	2.02	30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Kota Metro	22 Lembaga	100.000.000,00	PAD
1	3	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Kota Metro	74,59%	6.812.003.000,00	DAU

1	3	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah kab/Kota	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kab/Kota	Kota Metro	149 SR	6.812.003.000,00	DAU
1	3	03	2.01	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	1 Unit	541.000.000,00	DAU
1	3	03	2.01	32	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kota Metro	149 SR	6.271.003.000,00	DAU
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	Kota Metro	22,50%	1.000.000.000,00	DAU
1	3	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Persampahan yang dikembangkan dan dikelola	Kota Metro	1 Unit	1.000.000.000,00	DAU
1	3	04	2.01	17	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Kota Metro	1 unit	1.000.000.000,00	DAU
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kota Metro	75,97%	107.000.000,00	DAU/DB H

1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan aman	Kota Metro	10 Rumah Tangga	107.000.000,00	DAU
1	03	5	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD Limbah Domestik	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Metro	1 Unit	70.000.000,00	DAU
1	03	5	2.01	44	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Kota Metro	10 Rumah Tangga	37.000.000,00	DBH
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Kota Metro	70,50%	5.417.000.000,00	DAU
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah panjang saluran drainase dalam kondisi baik/Pembuangan aliran air tidak tersumbat	Kota Metro	3 Sistem Drainase	5.417.000.000,00	DAU

1	03	06	2.01	019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Metro	500 Meter	300.000.000,00	DAU
1	03	06	2.01	021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Metro	1 Sistem Drainase Lingkungan	3.117.000.000,00	DAU
1	03	06	2.01	024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Metro	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	DAU
1	03	06	2.01	030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Metro	2 Dokumen	1.000.000.000,00	DAU
1	03	06	2.01	031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Metro	1 Sistem Drainase Perkotaan	500.000.000,00	DAU
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	Kota Metro	23,88%	21.011.000.000,00	DAU
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Bangunan Gedung ber-IMB yang Sesuai dengan Arah Rencana Tata Ruang dan Penataan Bangunan Gedung	Kota Metro	9 Bangunan Gedung	21.011.000.000,00	DAU

1	03	08	2.01	17	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Kota Metro	6 Bangunan Gedung	15.500.000.000,00	DAU
1	03	08	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Metro	3 Bangunan Gedung	400.000.000,00	DAU
1	03	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Metro	3 Dokumen	4.946.000.000,00	DAU
1	03	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan	Kota Metro	70 Dokumen	165.000.000,00	DAU

				Bangunan Gedung melalui SIMBG						
1	03	09		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Metro	33,34%	444.000.000,00	DBH	
1	03	09	2.01	Penyelenggaraan Bangunan Dan Lingkungan Di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kab/ Kota dalam kondisi baik	Kota Metro	1 kawasan	444.000.000,00	DBH	
1	03	09	2.01	011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kota Metro	1 Kawasan	444.000.000,00	DBH
1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan	Kota Metro	72,11%	44.531.299.406,00	DAU	
1	03	10	2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Tingkat Kemantapan Jalan	Kota Metro	72,11%	44.531.299.406,00	DAU	
1	03	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Diseluruh Wilayah Kota Metro	387,307 Km	500.000.000,00	DAU
1	03	10	2.01	51	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Diseluruh Wilayah Kota Metro	5,8 Km	2.430.430.406,00	DAU
1	03	10	2.01	53	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	Diseluruh Wilayah Kota Metro	18,6 Km	7.840.000.000,00	DAU
1	03	10	2.01	55	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Diseluruh Wilayah Kota Metro	36,8 Km	15.450.000.000,00	DAU

1	03	10	2.01	56	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Diseluruh Wilayah Kota Metro	13,5 Km	5.600.000.000,00	DAU
1	03	10	2.01	59	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Diseluruh Wilayah Kota Metro	10 Km	12.710.869.000,00	DAU
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONTRUKSI	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Kota Metro	50%	200.000.000,00	DAU
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Konstruksi yang tersertifikasi	Kota Metro	50 orang	154.275.000,00	DAU
1	03	11	2.01	10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Kota Metro	50 Orang	89.275.000,00	DAU
1	03	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kota Metro	50 orang	65.000.000,00	DAU
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Metro	10 dokumen	30.000.000,00	DAU

1	03	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kota Metro	10 Dokumen	30.000.000,00	DAU
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Metro	185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	DAU
1	03	11	2.04	04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Kota Metro	185 Paket Pekerjaan	15.725.000,00	DAU
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan tata ruang	Kota Metro	89%	1.080.000.000,00	PAD
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Kota Metro	2 Dokumen	80.000.000,00	PAD
1	03	12	2.01	13	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Kota Metro	2 laporan	80.000.000,00	PAD

1	03	12	2.03		Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah kab/kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tata ruang daerah kab/kota	Kota Metro	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU
1	03	12	2.03	05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Kota Metro	1 Dokumen	350.000.000,00	DAU
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan ruang Daerah kabupaten/Kota	Kota Metro	4 Dokumen	650.000.000,00	PAD
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Kota Metro	2 Dokumen	200.000.000,00	PAD
1	03	12	2.04	08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Kota Metro	1 Dokumen	100.000.000,00	PAD
1	03	12	2.04	12	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Kota Metro	1 dokumen	350.000.000,00	PAD

BAB V

PENUTUP

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas PUTR Kota Metro Tahun 2026, merupakan Perencanaan Tahunan yang bersifat operasional dan mengacu pada RKPD Kota Metro Tahun 2026. Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah .

Uraian rencana program/ kegiatan yang terdapat pada rancangan rencana kerja Tahun 2026 ini diharapkan nantinya sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kota Metro . Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program dan kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro Tahun 2026 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro, baik dalam kerangka regulasi maupun

mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah (PD) serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses musyawarah antar pelaku pembangunan, agar program/kegiatan menjadi terintegrasi baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Kota Metro, 2025
Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Tata Ruang Kota Metro



ARDAH, S.E. M.A.P

Pembina Tk.I/IV b

NIP. 19690805 198803 2 001